

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MANGGARAI**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan Desa, Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dan Bidang Pembangunan Desa serta Kesekretariatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Laporan ini tidak hanya memuat berbagai capaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai, tetapi juga memuat beberapa target yang belum sepenuhnya tercapai. Beberapa target berhasil dilampaui, namun dilain pihak beberapa target belum dapat dipenuhi karena berbagai faktor yang berada di luar kendali DPMD Kabupaten Manggarai. Namun demikian, secara umum berbagai target strategis yang telah ditetapkan berhasil diwujudkan selama Tahun 2021.

Kami memandang bahwa pencapaian kinerja Tahun 2021 tidak terlepas dari upaya team work yang bekerja keras, bahu membahu melaksanakan berbagai kegiatan di lingkungan DPMD Kabupaten Manggarai dalam rangka memberikan kontribusi pada upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu, berbagai upaya yang baik perlu terus ditingkatkan, dan berbagai kendala yang menghalangi perlu terus dilakukan perbaikan. Dengan cara seperti ini, DPMD Kabupaten Manggarai menjadi Perangkat Daerah yang secara terus menerus melakukan perbaikan, dan berupaya memberikan kontribusi positif bagi upaya reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan menjadi bagian dari upaya untuk perbaikan kinerja berkelanjutan dan menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja kami di tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

| | |
|--|--|
| Pengantar | |
| Daftar Isi | |
| Ringkasan Eksekutif | |
| Bab I Pendahuluan | |
| A. Latar Belakang | |
| B. Tugas Pokok dan Fungsi | |
| C. Struktur Organisasi | |
| D. Sistematika Penyajian..... | |
| Bab II Perencanaan Kinerja | |
| A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026 | |
| B. Indikator Kinerja Utama | |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja | |
| A. Capaian Kinerja Tahun 2021 | |
| B. Analisis Capaian Kinerja | |
| C. Realisasi Keuangan | |
| Bab IV Penutup | |
| Lampiran : | |
| 1. Matriks Renstra | |
| 2. IKU..... | |
| 3. RKT | |
| 4. PK | |
| 5. Pengukuran Kinerja | |

RINGKASAN EXECUTIVE

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap kinerja instansi pemerintah diukur sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Manggarai. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan kinerja selama 1 tahun. Pada Tahun 2020, DPMD Kabupaten Manggarai telah melaksanakan 5 Indikator Kinerja dan 2 Sasaran Strategis yang tertuang dalam 7 Program dan 28 Kegiatan. Seluruh kegiatan/program tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2020 untuk mencapai sasaran. Dengan kata lain seluruh kegiatan/program yang telah direncanakan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan secara *self assessment* atas realisasi pelaksanaan Perencanaan Kinerja Tahun 2020, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 2 sasaran dan indikator yang telah ditetapkan adalah **91,45 %**, dengan Kategori “MEMUASKAN”. Pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut :

| No | Sasaran | Capaian |
|-------------------|---|------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa | 96,1 % |
| 2. | Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat yang partisipatif | 86,90 % |
| Rata- Rata | | 91, 45 % |
| Kategori | | Memuaskan |

Keberhasilan sasaran-sasaran tersebut secara umum disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai.
2. Keikutsertaan masyarakat yang optimal dalam memperlancar segala kegiatan.
3. Kepastian dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran.
4. Kepastian waktu pelaksanaan kegiatan yang tepat.
5. Kesiapan Aparatur yang optimal dalam menjalankan tugas walaupun ada beberapa jabatan yang lowong.
6. Koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi kegiatan yang semakin baik.

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna mempertahankan pencapaian kinerja sasaran yaitu :

1. Perlu adanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DPMD dan Perangkat Desa.
2. Mendorong desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan peran lembaga masyarakat di Desa maupun di Kecamatan.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan aparatur desa.
5. Mendorong desa agar tepat waktu menyusun perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pelaporan keuangan.
6. Meningkatkan koordinasi kerja dan kerjasama dengan TP-PKK Kabupaten dalam tata kelola kegiatan dan keuangan.

Secara keseluruhan DPMD Kabupaten Manggarai telah menganggarkan pembiayaan langsung seluruh program dan kegiatannya sebesar **Rp.1.586.199.471.-** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp.1.385.243.466 (87,33%)**. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan pendukung 2 Sasaran Strategis sebesar **Rp.1.301.765.900,00**. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap program/kegiatan pendukung sasaran strategis. Realisasi pengeluaran keuangan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yaitu sebesar **Rp.1.170.220.640.-00** dari total dana belanja langsung program/kegiatan pendukung sasaran strategis yang dialokasikan dalam DPA DPMD Tahun Anggaran 2021.

Ruteng, Januari 2022
Kepala Dinas PMD Kabupaten Manggarai

Drs. Yoseph Jehalut
Pembina Tk.I-IV/b
Nip. 19651128 199402 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan pula Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Menpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD Tahun 2020.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai melalui LAKIP ini akan memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja OPD selama Tahun 2020. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2021, sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (Feedback) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (continuing improvement).

1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Manggarai

1. Dasar Hukum Berdirinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Manggarai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah bahwa kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai merupakan salah satu unsur pelaksana urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Manggarai

Berdasarkan Perda Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Manggarai dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 tentang, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai, menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam melaksanakan tugasnya DPMD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Susunan Organisasi

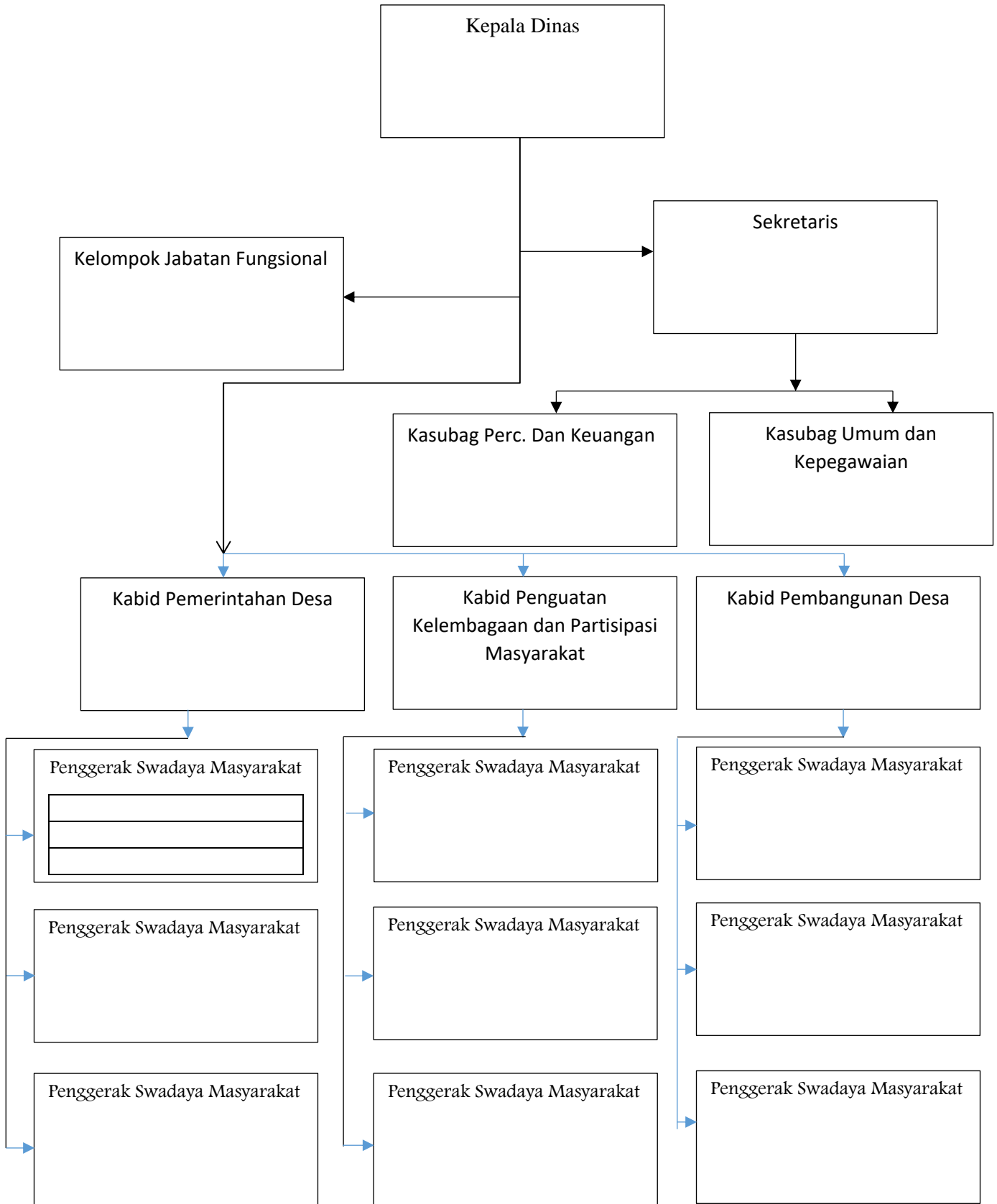
Organisasi DPMD Kabupaten Manggarai ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka susunan organisasi DPMD Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi 2 Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi 3Seksi yaitu :
 - a. Seksi Penataan Desa;
 - b. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa; dan
 - c. Seksi Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa.
4. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, membawahi 3 Seksi yaitu :
 - a. Seksi Penguatan Kelembagaan;
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat.
5. Bidang Pembangunan Desa, membawahi 3 Seksi yaitu :
 - a. Seksi PerencanaanPembangunan Desa;
 - b. Seksi Kerja Sama Antar Desa; dan
 - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa.
6. UPT Dinas; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021



Susunan kepegawaian dan perlengkapan DPMD Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan.

- S2 : 1 Org
- S1 : 9 Org
- Sarjana Muda : 3 Org
- SLTA : 9 Org
- SLTP : 1 Org

2. Berdasarkan Golongan

- Gol. IV : 3 Org
- Gol. III : 14 Org
- Gol. II : 6 Org

3. Berdasarkan Eselon

- Eselon. II : 1 Org
- Eselon. III : 4 Org
- Eselon. IV : 8 Org

4. Diklat Penjenjangan

- PIM . II : 1 Org
- PIM. III : 1 Org
- PIM. IV : 8 Org

5. Jenis Kelamin

- Laki-laki : 15 Org
- Perempuan : 7 Org

6. Jumlah Jabatan Struktural : 17 dan terisi 15, kurang 2 orang.

7. Tenaga Kontrak Daerah 1 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 2 orang yaitu :

- Adrianus Nagong
- Marselinus Reo Due, S.Pd,M.M
- Yuliana Indria Jehami, S.pd

Aset Modal (sarana dan pra sarana perkantoran)

DAFTAR PEGAWAI DINAS PMD TAHUN 2022

| No | Nama | NIP | Pangkat/Golongan | Jabatan |
|----|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1 | Drs. Yoseph Jehalut | 19651128 199402 1 002 | Pembina Tk.I-IV/b | Kepala Dinas PMD |
| 2 | Ir.Lorens Jelamat | 19651215199403 1 012 | Pembina Tk.I – IV/b | Sekretaris DPMD |
| 3 | Jedaut Aloysius,SH. | 19651231 200012 1 048 | Pembina- IV/a | Kabid Pembangunan Desa |
| 4 | Agustinus E. Demo,S.STP | 19800508 199912 1 001 | Penata - III / c | Kabid Pemerintahan Desa |
| 5 | Tibortius Suhardi,S.Hut | 19760414 201001 1 012 | Penata Tk.I - III /d | Kabid Kelemb. & Partis. Masyarakat |
| 6 | | | | |
| 7 | Ernestivonny O.Jemada,STP | 19761122 200312 2 005 | Penata TK.I- III /d | Penggerak Swadaya Masyarakat |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | Germana Ag. M. F. Basan,SE | 19780308 200801 2 022 | Penata TK.I- III /d | Penggerak Swadaya Masyarakat |
| 11 | Heribertus W. G., S,STP, m.Tr.IP | 19851103200312 1001 | Pembina –IV/a | Penggerak Swadaya Masyarakat |
| 12 | Fransiskus Magang | 19670217 199103 1 008 | Penata .Tk.I – III / d | Penggerak Swadaya Masyarakat |
| 13 | Clara Elisabeth Yudiana | 19680917199303 2 013 | Penata Tk.I – III /d | Kasubag Perenc & Keuangan |
| 14 | Saveriana I.Mutiara,SE | 19771212 201001 2 004 | Penata – III / c | Penggerak Swadaya Masyarakat |
| 15 | Yohanes Tan, SE | 19790505 201001 1 041 | Penata – III / c | Penggerak Swadaya Masyarakat |
| 16 | Servasius Iron, A.Md | 19770513 200604 1 020 | Penata - III / c | Penggerak Swadaya Masyarakat |
| 17 | Fransiskus Jen, S.Sos | 19810612 201001 1 029 | Penata Tk.I – III /d | S t a f |
| 18 | Ferdinandus Sensi, A.Md | 19800301 200801 1 020 | Penata Muda Tk. III / b | S t a f |
| 19 | Kanisius Tulus | 19751231 199903 1 015 | Penata Muda – III/ a | S t a f |
| 20 | Saverinus Hambur, A. Md | 19810821 201101 1 014 | Penata Muda – III/ a | Staf |
| 21 | Laurensius M.N. Waso,SE | 19970721 202012 1 002 | Penata Muda-III/a | S t a f |
| 22 | Felomena Imul | 19680718 200701 2 026 | Pengatur Tk.I - II / d | S t a f |
| 23 | Aloysius Jemaman | 19670327 200701 1 016 | Pengatur Tk.I - II / d | Staf |
| 24 | Stefanus Garus | 19791001 200701 1 016 | Pengatur Tk.I – II/d | S t a f |
| 25 | Adriana K. Tatic | 19830708 201001 2 029 | Pengatur II/ c | S t a f |
| 26 | Agustinus J. Parut | 19800818 201001 1 006 | Pengatur II/ c | Staf |
| 27 | Rosdiana K. Afra Kama | 19810408 201406 2 001 | Pengatur Muda II/b | Staf |
| 28 | Adrianus Nagong | | Tenaga Kontrak | Staf |
| 29 | Marselinus Reo Due, S.Pd,M.M | | THL | Staf |
| 29 | Yuliana Indria Jehami, S.Pd | | THL | Staf |

DAFTAR JABATAN STRUKTURAL DAN ESELON DINAS PMD TAHUN 2019

| No | Nama Jabatan | Jumlah | Eselon | Keterangan |
|--------------------|-------------------|-----------|----------|----------------|
| 1. | Kepala Dinas | 1 | II B | Sudah terisi |
| 2. | Sekretaris Dinas | 1 | III A | Sudah Terisi |
| 3. | Kepala Bidang | 3 | III B | Sudah Terisi |
| 4. | Kepala Seksi | 8 | IV A | 1 Belum Terisi |
| 5. | Kepala Sub Bagian | 1 | IV A | 1 belum terisi |
| J u m l a h | | 14 | ~ | |

1.4 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kab. Manggarai Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajiannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kab. Manggarai Tahun 2021 meliputi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kab. Manggarai Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Rencana Kinerja Tahun 2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kab. Manggarai dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2021.

Bab IV Penutup

menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kab. Manggarai Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2021 – 2026

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kab. Manggarai telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021–2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kab. Manggarai yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam Tahun 2021 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kab. Manggarai telah mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Manggarai, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Secara ringkas substansi Renstra, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kab. Manggarai dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. Visi

Berdasarkan Visi Kabupaten Manggarai **“MANGGARAI MAJU, ADIL, DAN BERDAYA SAING“**, maka sesuai peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Manggarai yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati, maka dirumuskan Visi DPMD Kabupaten Manggarai di masa yang akan datang serta mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Manggarai yang merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai dengan kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di Kabupaten Manggarai, maka rumusan visinya yaitu:

“ TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DESA”

2. Misi

Misi Dinas PMD Kabupaten Manggarai yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi di atas. Rumusan Misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu lingkup pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta penguatan lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi di perdesaan untuk lima tahun mendatang yaitu :

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan desa;
- Meningkatkan kualitas pelayanan kemasyarakatan;
- Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat;

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan juga merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, DPMD Kabupaten Manggarai menetapkan Tujuan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.

4. Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Target

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya DPMD Kab. Manggarai menjabarkan dalam sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2021-2026. Disamping itu, DPMD Kabupaten Manggarai juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada DPMD Kabupaten Manggarai serta RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra DPMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026 memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines process (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama DPMD Kabupaten Manggarai yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2021–2026 sesuai periode Renstra telah ditetapkan sbb:

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | |
|-----|---|-------------------------|---|
| 1. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa | 1 | Jumlah desa yang difasilitasi dan dibina: |
| | | 1 | Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa |
| | | 2 | Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan BPD |
| | | 3 | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan APBDes dan RRK Desa |
| | | 4 | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes |
| | | 5 | Jumlah Aparat Pemdes yang mengikuti Rapat Evaluasi |
| | | 6 | Jumlah Pejabat Kades yang dilantik |
| | | 2 | Jumlah Ranperda yang diusulkan |
| | | 3 | Jumlah desa yang pengelolaan administrasinya baik |
| | | 4 | Jumlah Satker untuk Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa |
| 2 | Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat yang partisipatif | 1 | Jumlah Lembaga ekonomi pedesaan yang dibentuk dan dibina |
| | | 1 | Jumlah Bumdes yang dibina |
| | | 2 | Jumlah Kelompok masyarakat yang dibina: |
| 1 | Jumlah Pokjanal Posyandu yang dibina | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | 2 | Jumlah UPK kelompok SPKP yang dibina dan jumlah aset kelompok yang ditata. |
| | | 3 | Jumlah desa dan lembaga masyarakat desa yang difasilitasi dan dibina: |
| | | 1 | Jumlah desa yang mendapat pembinaan pengelolaan dana desa |
| | | 2 | Desa yang ditetapkan untuk peringatan BBGRM |
| | | 3 | Jumlah kelompok PKK yang dibina dan difasilitasi |
| | | 4 | Jumlah Desa yang dimekarkan |
| | | 6 | Jumlah lembaga adat yang difasilitasi dan dibina |
| | | 7 | Jumlah posyandu juara lomba starata |

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas PMD Kabupaten Manggarai telah menetapkan kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | TARGET |
|-----|---|---|---|------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa | 1 | Jumlah desa yang difasilitasi dan dibina: | 290 |
| | | 1 | Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa | - |
| | | 2 | Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan BPD | - |
| | | 3 | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan APBDes dan RRRK Desa | 145 |
| | | 4 | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes | 145 |
| | | 5 | Jumlah Aparat Pemdes yang mengikuti Rapat Evaluasi | - |
| | | 6 | Jumlah Penjabat Kades dan BPD yang dilantik | - |
| 2 | Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat yang partisipatif | 2 | Pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa | 1 |
| | | 3 | Jumlah desa yang pengelolaan administrasinya baik | 145 |
| | | 1 | Jumlah Lembaga ekonomi pedesaan yang dibentuk dan dibina | 58 |
| | | 1 | Jumlah Bumdes yang dibina | 58 |
| | | 2 | Jumlah Kelompok masyarakat yang dibina: | 31 |
| | 1 | Jumlah Pokjanal Posyandu yang dibina | 20 | |
| | 2 | Jumlah UPK kelompok SPKP yang dibina dan jumlah aset kelompok yang ditata | 11 | |

| | | | | |
|--|--|----------|--|------------|
| | | 3 | Jumlah desa dan lembaga masyarakat desa yang difasilitasi dan dibina: | 395 |
| | | 1 | Jumlah desa yang mendapat pembinaan pengelolaan dana desa | 145 |
| | | 2 | Desa yang ditetapkan untuk peringatan BBGRM | - |
| | | 3 | Jumlah kelompok PKK yang dibina dan difasilitasi | 184 |
| | | 4 | Jumlah Desa yang dimekarkan | 52 |
| | | 5 | Jumlah pengurus Bumdes yang telah mendapat pelatihan | - |
| | | 6 | Jumlah lembaga adat yang difasilitasi dan dibina | 11 |
| | | 7 | Jumlah posyandu juara lomba strata | 3 |

PROGRAM DAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2021

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN | KET. |
|---------------|--|----------------------|-------------|
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 250.550.571.- | APBD |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 32.133.000.- | APBD |
| 3 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1.000.000.- | APBD |
| 4 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | 118.592.000.- | APBD |
| 5 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | 91.085.700.- | APBD |
| 6 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | 755.090.200.- | APBD |
| 7 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 337.748.000.- | APBD |
| JUMLAH | | 1.586.199.471 | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja DPMD Kabupaten Manggarai adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja DPMD Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Bab ini akan menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan /kendala dan permasalahan.

3.1 URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Untuk mengukur kinerja kegiatan DPMD Kabupaten Manggarai secara menyeluruh diperlukan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Indikator Masukan (Input) yaitu segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran seperti Dana, SDM, Informasi, Kebijaksanaan/Peraturan Perundang-undangan, waktu teknologi dll.
2. Indikator Keluaran (Output) yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/ atau non fisik) sebagai hasil langsung dicapai dari sesuatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Indikator Hasil (Outcome) yaitu segala sesuatu yang dihasilkan dan mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan 3 indikator yang telah diuraikan di atas. Pengukuran ini dengan menggunakan/memanfaatkan data kinerja, untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Pengumpulan data kinerja DPMD dilakukan dengan menyebarkan format Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja Kegiatan Dan Pengukuran Pencapaian Sasaran kepada setiap kegiatan.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kab. Manggarai telah mencanangkan beberapa target kinerja pencapaian sasaran strategis. Upaya untuk pencapaian target kinerja sasaran-sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Rencana Operasional Tahun 2021 untuk mencapai 2 sasaran strategis.

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2021 tercermin dalam pencapaian 2 sasaran strategis yaitu: 1). Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan 2). Meningkatnya keberdayaan masyarakat yang partisipatif. Pencapaian 2 sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 program utama dan 3 program penunjang. Program utama Dinas PMD dicapai melalui pelaksanaan 14 kegiatan. Pencapaian Kinerja seluruh Sasaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

A. Sasaran I : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Kinerja sasaran ini didukung oleh capaian kinerja 3 sub indikator pada 4 (empat) kegiatan dengan capaian masing-masing indikator sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Evaluasi Pencapaian Sasaran: *Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*

| Indikator Kinerja | Satuan | Target 2016-2021 | Tahun 2016-2019 | | Capaian Kinerja s/d Tahun 2019 (%) | Tahun 2021 | | Capaian Kinerja Tahun 2021 (%) | |
|-------------------|--|------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-----|
| | | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Jumlah Desa yang difasilitasi dan dibina | Desa | 145 | 145 | 145 | 100 | 290 | 290 | 100 |
| 1 | Jlh desa yang melaksanakan pilkades dan BPD | Desa | 145 | 42 | 42 | 100 | - | - | - |
| 2 | Jlh desa yg difasilitasi penyusunan APBDes dan RRKDes | Desa | 145 | 145 | 145 | 100 | 145 | 145 | 100 |
| 3 | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan APBDes dan RRK Desa | Desa | 145 | 145 | 145 | 100 | 145 | 145 | 100 |
| 2 | Jumlah Ranperda yang diusulkan | Ranperda | 8 | 5 | 5 | 100 | - | - | - |
| 3 | Jumlah desa yang mengelola administrasi secara baik | Desa | 145 | 145 | 145 | 100 | 145 | 145 | 100 |
| 4 | Jumlah Satker Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa | Satker | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| Rata-rata | | | | | 100 | | | 100,00 | |
| Kategori | | | | | Memuaskan | | | Memuaskan | |

INDIKTOR KINERJA SASARAN I: JUMLAH DESA YANG DIFASILITASI DAN DIBINA

Fasilitasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan urusan wajib Dinas PMD. Kinerja pada indikator ini merupakan output pelaksanaan 4 (empat) kegiatan yaitu: 1). *Fasilitasi Pemilihan Kepala desa dan BPD*; 2). *Fasilitasi Penyusunan APBDes dan RRKDesa*; 3). *Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa*; dan 4). *Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah*.

Secara umum indikator kinerja sasaran ini tergolong dalam katagori *memuaskan* karena dilaksanakan tuntas 100% dengan desa yang difasilitasi dan dibina sebanyak 145 Desa.

Berikut penjelasan tentang indikator capaian kinerja kegiatan yang mendukung pencapaian kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa :

a. Sub 1 Indikator Kinerja 1: Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Pemilihan Kepala Desa dan BPD.

Pergantian Kepala Desa dan BPD dilaksanakan setiap 6 tahun sekali kecuali karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Di Kabupaten Manggarai pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam 3 (tiga) gelombang. Gelombang Pertama tahun 2016 sebanyak 42 desa, gelombang kedua tahun 2018 sebanyak 10 desa, gelombang ketiga rencananya akan dilakukan secara serentak pada tahun 2020 sebanyak 94 desa, tetapi karena Kabupaten Manggarai melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan situasi pandemi Covid 19 sehingga pelaksanaannya di tunda. Dan pada tahun 2020 hanya melaksanakan Pemilihan / pengisian keanggotaan BPD sebanyak 12 Desa, dengan rinciannya pada tabel dibawah ini :

DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN BPD TAHUN 2020

| No. | Kecamatan | Desa | | Ket. |
|-----|------------------|------|-----------------|------|
| 1 | Ruteng | 1 | Bulan | |
| | | 2 | Pong Lale | |
| 2 | Rahong Utara | 3 | Benteng Tubi | |
| | | 4 | Bangka Ruang | |
| 3. | Satar Mese Barat | 5 | Golo RopongBuar | |
| | | 6 | Cambir Leca | |
| | | 7 | Wongka | |
| 4. | Satar Mese | 8 | Ulu Belang | |
| 5. | Wae Rii | 9 | Benteng Poco | PAW |
| 6. | Cibal | 10 | Nenu | PAW |
| 7. | Wae Rii | 11 | Wae Renca | |
| 8. | Satar Mese Utara | 12 | Mata Wae | |

Untuk 22 desa persiapan yang pembentukannya di atur dalam Peraturan Bupati Manggarai nomor 61 tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan dalam wilayah Kabupaten Manggarai telah dievaluasi dan diverifikasi oleh Tim Evaluasi dari Dinas PMD Propinsi Nussa Tenggara Timur yang didampingi oleh Dinas Kabupaten Manggarai dan Kecamatan. Adapun desa – desa yang dievaluasi dan diverifikasi adalah sebagai berikut :

**DAFTAR NAMA 22 DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2020**

| NO | KEC. | NO | DESA INDUK | DESA PERSIAPAN | Keterangan |
|----|------------------|----|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | SATAR MESE BARAT | 1 | Pemekaran dari Desa Terong | Bea Terong | Laporan Lengkap |
| | | 2 | Pemekaran dari Desa Cambir Leca | Lereng | Laporan Lengkap |
| | | 3 | Pemekaran dari Desa Satar Luju | Luju Mas | Laporan Lengkap |
| 2. | SATAR MESE | 1 | Pemekaran dari Desa Pongkor | Ulu ngali | Laporan Lengkap |
| 3. | CIBAL | 1 | Pemekaran dari Desa Welu | Lura | Laporan Lengkap |
| | | 2 | Pemekaran dari Desa Nenu | Benteng Todo | Laporan Lengkap |
| | | 3 | Pemekaran dari Desa Ladur | Liang Tongkeng | Laporan Lengkap |
| 4. | REOK | 1 | Pemekaran dari Desa Ruis | Ruis Timur | Laporan Lengkap |
| 5. | WAE RII | 1 | Pemekaran dari Desa Golo Cador | Golo Ling | Laporan Lengkap |
| | | 2 | Pemekaran dari Desa Wae Rii | Bangka Wade | Laporan Lengkap |
| 6 | RAHUT | 1 | Pemekaran dari Desa Buar | Compang Ntala | Laporan Lengkap |
| | | 2 | Pemekaran dari Desa Tengku Lese | Cunca Lega | Laporan Lengkap |
| | | 3 | Pemekaran dari Desa Pong Lengor | Bangka Putuk | Laporan Lengkap |
| | | 4 | Pemekaran dari Desa Golo Langkok | Golo Wangko | Laporan Lengkap |
| 7 | LELAK | 1 | Pemekaran dari Desa Urang | Redo | Laporan Lengkap |
| | | 2 | Pemekaran dari Desa Bangka Lelak | Wae nanga | Laporan Lengkap |
| 8 | RUTENG | 1 | Pemekaran dari Desa Bulan | Bung | Laporan Lengkap |
| | | 2 | Pemekaran dari Desa Golo Worok | Bangka Wela | Laporan Lengkap |
| 9 | CIBAL BARAT | 1 | Pemekaran dari Desa Bere | Compang Bere | Laporan Lengkap |
| | | 2 | Pemekaran dari Desa Wae Codi | Golo Taas | Laporan Lengkap |
| | | 3 | Pemekaran dari Desa Timbu | Golo Lada | Laporan Lengkap |
| 10 | Reok Barat | 1 | Pemekaran dari Desa Loce | Benteng Loce | Laporan Lengkap |

Jumlah Aparatur Desa di Kabupaten Manggarai tahun 2020 sebagai berikut :

1. Aparatur Desa :

- 1). Jumlah Kepala Desa

| | |
|----------------|-----------------|
| Laki – laki | : 53 orang |
| Perempuan | : 2 orang |
| Jumlah: | 55 orang |

- 2). Jumlah Penjabat Kepala Desa

| | |
|----------------|-----------------|
| Laki – Laki | : 89 orang |
| Perempuan | : 1 orang |
| Jumlah: | 90 orang |

- 3). Tingkat Pendidikan Kades/Penjabat Sarjana : 10 orang

| | |
|----------------|------------------|
| Diploma | : 4 orang |
| SLTA/seder | : 131 orang |
| SLTP/seder | : - orang |
| Jumlah: | 145 orang |

- 4). Tingkat Pendidikan Kaur

| | |
|------------|-------------|
| Sarjana | : 17 orang |
| Diploma | : - orang |
| SLTA/seder | : 345 orang |
| SLTP/seder | : 67 orang |

| | | |
|--|------------|---|
| | | Jumlah: 429 orang |
| 5). Tingkat Pendidikan Kadus | | Sarjana : ~ orang Diploma : ~ orang SLTA/ seder : 238 orang SLTP/ seder : 174 orang <u>Jumlah: 412 orang</u> |
| 6). Jumlah Perangkat Desa (yg terisi) | | Sekdes : 145 orang Kaur/Kasi : 860 orang Kadus : 447 orang <u>Jumlah:1.462 orang</u> |
| 7). Aparat Desa yg belum terisi/kosong Kepala Desa | : | ~ orang |
| | | Sekdes : ~ orang Kaur/Kasi : 10 orang Kadus : 15 orang <u>Jumlah: 15 orang</u> |
| 8). Tingkat Pendidikan Sekdes | | Sarjana : ~ orang SLTA/Seder. : 145 orang SLTP/Seder. : ~ orang SD/Seder. : ~ orang <u>orang</u> Jumlah: 145 orang |
| 2. Badan Permusyawaratan Desa | | |
| 1). Keanggotaan BPD yg terisi | | Ketua : 145 orang Wakil : 145 orang Sekretaris : 145 orang Anggota :1.015 orang <u>Jumlah:1.450 orang</u> |
| 2). Keanggotaan BPD yg blm terisi | | Ketua : ~ orang Wakil : ~ orang Sekretaris : ~ orang Anggota : ~ orang <u>Jumlah: ~ orang</u> |
| 3). Tingkat Pendidikan BPD : | Ketua | Sarjana : 24 orang SLTA : 52 orang SLTP : 69 orang <u>Jumlah: 145 orang</u> |
| | Wakil | Sarjana : 11 orang SLTA : 49 orang SLTP : 85 orang <u>Jumlah: 145 orang</u> |
| | Sekretaris | Sarjana : 8 orang SLTA : 59 orang SLTP : 88 orang <u>Jumlah: 145 orang</u> |
| | Anggota | Sarjana : 50 orang SLTA : 170 orang SLTP : 795 orang <u>Jumlah:1.015 orang</u> |

b. Sub 2 Indikator Kinerja 1 : Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan RAPBDes dan RRKDesa

Kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dicapai dengan melakukan fasilitasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran tingkat desa, serta fasilitasi penyusunan Rincian Rencana Kegiatan Desa (RRKDes) yang merupakan rencana detail pelaksanaan anggaran desa. Kegiatan ini merupakan urusan yang wajib dilakukan setiap tahun untuk mengendalikan penggunaan anggaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tahun 2020 fasilitasi penyusunan RAPBDes dan RRKDes juga telah dilaksanakan bagi 145 desa (100%) dengan peserta terdiri dari Sekretaris Desa dan Operator Siskeudes.

c. Sub 3 Indikator Kinerja 1: Jumlah Desa yang pengelolaan administrasinya baik.

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa juga diukur dari kualitas administrasi desa. Telah banyak instrument yang telah diturunkan ke desa baik dalam bentuk buku, format dan regulasi tentang tata kelola administrasi desa. Jenis dan bentuk administrasi desa yang secara regular dibina ketersediaan dan penggunaannya terdiri dari:

- (1) Administrasi Umum terdiri dari:
 - (a) Buku data peraturan desa
 - (b) Buku data Keputusan Kepala Desa
 - (c) Buku data inventaris desa
 - (d) Buku data aparat pemerintah desa
 - (e) Buku tanah milik desa
 - (f) Buku data tanah di desa
 - (g) Buku agenda
 - (h) Buku ekspedisi.
- (2) Buku Administrasi Penduduk terdiri dari:
 - (a) Buku data induk penduduk
 - (b) Buku data mutasi penduduk
 - (c) Buku data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan
 - (d) Buku data penduduk sementara.
- (3) Administrasi Keuangan Desa terdiri dari:
 - (a) Buku anggaran penerimaan
 - (b) Buku anggaran pengeluaran rutin
 - (c) Buku anggaran pengeluaran pembangunan
 - (d) Buku Kas Umum
 - (e) Buku Kas Pembantu Penerimaan
 - (f) Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin
 - (g) Buku kas pembantu pengeluaran pembangunan

- (4) Administrasi Pembangunan terdiri dari:
 - (a) Buku Rencana Pembangunan
 - (b) Buku Kegiatan pembangunan
 - (c) Buku Inventaris Proyek
 - (d) Buku Kader-Kader Pembangunan
- (5) Administrasi BPD terdiri dari:
 - (a) Buku data anggota BPD
 - (b) Buku data keputusan BPD
 - (c) Buku data kegiatan BPD
 - (d) Buku agenda BPD
 - (e) Buku ekspedisi BPD
- (6) Administrasi lainnya terdiri dari:
 - (a) Buku Profile Desa
 - (b) Buku register penyelesaian kasus
 - (c) Buku data penduduk miskin
 - (d) Buku penerima rastra
 - (e) Buku data lembaga masyarakat desa
 - (f) Buku tamu
 - (g) Dan buku lainnya sesuai kebutuhan desa.

Pembinaan dalam bentuk bimtek pengisian buku administrasi bagi aparatur, pemeriksaan pengisian dan ketersediaan buku di desa telah dilakukan secara regular setiap tahun. Kelengkapan dan keteraturan pengisian buku administrasi oleh masing-masing aparat desa bervariasi.

B. SASARAN II: MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF

Capaian kinerja sasaran ini merupakan kontribusi pelaksanaan 3 program dan 11 kegiatan dengan indikator sasaran :

- 1). Jumlah lembaga ekonomi yang dibentuk dan dibina;
- 2). Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi dan dibina; dan
- 3). Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi dan dibina.

Difasilitasi maksudnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Dinas PMD hanya sebagai fasilitator kegiatan, sedangkan pelaksananya adalah aparatur desa, pengurus bumdes dan kelompok masyarakat desa.

Dibina maksudnya kegiatan tersebut telah dijalankan oleh aparatur desa, pengurus bumdes atau kelompok masyarakat namun tetap dalam bimbingan, monitoring dan evaluasi oleh Dinas PMD. Secara umum capaian indikator kinerja sasaran ini dipandang ***memuaskan*** karena dilaksanakan tuntas 91.04 % dengan desa yang difasilitasi dan dibina sebanyak 145 Desa sebagaimana ditampilkan dalam tabel capaian kinerja sebagai berikut:

Evaluasi Pencapaian Sasaran: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat yang Partisipatif

| Indikator Kinerja | Satuan | Target 2016-2021 | Tahun 2017-2019 | | Capaian Kinerja s/d Tahun 2019 (%) | Tahun 2020 | | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) | |
|-------------------|---|------------------|-----------------|------------|------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------|------------------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | |
| 1 | Jumlah Lembaga ekonomi pedesaan yang dibentuk dan dibina | Desa | 145 | 87 | 82 | 94.25 | 58 | 58 | 100 |
| 1 | Jumlah Bumdes yang dibentuk dan dibina | Bumdes | 145 | 87 | 82 | 94.25 | 53 | 53 | 100 |
| 2 | Jumlah Kelompok masyarakat yang dibina | Klpk | 111 | 51 | 50 | 98.75 | 31 | 31 | 100 |
| 1 | Jumlah Pokjanal Posyandu yang dibina | Klpk | 100 | 40 | 39 | 97.5 | 20 | 20 | 105 |
| 2 | Jumlah UPK kelompok SPKP yang dibina dan jumlah aset kelompok yang ditata | UPK | 11 | 11 | 11 | 100 | 11 | 11 | 100 |
| 3 | Jumlah desa dan lembaga masyarakat desa yang difasilitasi dan dibina | Unit | 587 | 546 | 543 | 89.07 | 395 | 395 | 100 |
| 1 | Jumlah desa pembinaan pengelolaan dana desa | Desa | 145 | 145 | 145 | 100 | 145 | 145 | 100 |
| 2 | Desa yang ditetapkan untuk peringatan BBGRM | Desa | 5 | 3 | 3 | 100 | - | - | - |
| 3 | Jumlah kelompok PKK yang dibina dan difasilitasi | Klpk | 184 | 184 | 184 | 100 | 184 | 184 | 100 |
| 4 | Jumlah Desa yang dimekarkan | Desa | 65 | 65 | 22 | 33.84 | 52 | 52 | 100 |
| 5 | Jumlah pengurus Bumdes yang telah mendapat pelatihan | Desa | 145 | 116 | 116 | 100 | - | - | - |
| 6 | Jumlah lembaga adat yang difasilitasi dan dibina | Desa | 44 | 29 | 26 | 89.65 | 11 | 11 | 100 |
| 7 | Jumlah posyandu juara lomba starata | Kec. | 4 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 |
| Rata-rata | | | | | 94.02 | | | | 100 |
| Katagori | | | | | Sangat Baik | | | | Memuaskan |

INDIKTOR 1 KINERJA SASARAN II : JUMLAH LEMBAGA DAN KELOMPOK MASYARAKAT DESA YANG DIFASILITASI DAN DIBINA

Capaian kinerja sasaran ini merupakan kontribusi pelaksanaan 3 program dan 11 kegiatan dengan indikator sasaran:

- 1). Jumlah lembaga ekonomi yang dibentuk dan dibina;
- 2). Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi dan dibina; dan
- 3). Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi dan dibina.

Secara umum capaian indikator kinerja sasaran ini dinilai **memuaskan** karena dilaksanakan 4tuntas dan target yang dicapai 91.04 % dengan desa yang difasilitasi dan dibina sebanyak 145 Desa.

Lebih lanjut capaian sasaran meningkatnya keberdayaan masyarakat yang partisipatif dapat dijelaskan melalui capaian kinerja per kegiatan dalam sasaran tersebut sebagai berikut :

a. Sub 1 Indikator 1 Kinerja Sasaran II: Jumlah Lembaga Ekonomi yang dibentuk dan dibina

Lembaga ekonomi desa yang dibentuk dan dibina adalah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bidang Usahanya adalah bergerak di bidang jasa dan dagang, sehingga Sampai 2020 kinerja pembentukan Bumdes **Memuaskan** karena telah berhasil dibentuk 140 Bumdes baru, sehingga upaya ini mendongkrak capaian kinerja pada kegiatan ini mencapai 100%.

Pembinaan yang dilakukan Dinas PMD terhadap Bumdes mencakup aspek :

- 1). Regulasi pembentukan;
- 2). Kelayakan usaha;
- 3). Administrasi pengelolaan; dan
- 4). Pertanggungjawaban pengelolaan.

Jumlah BUMDES dan Penyertaan Modal dari Tahun 2016 – 2020 adalah sbb :

| No | TAHUN | JUMLAH BUMDES | PENYERTAAN MODAL | SUMBER DANA |
|--------------|-------|---------------|------------------|-------------|
| 1 | 2016 | 20 | - | |
| 2 | 2017 | 43 | 2,624,627,608 | APBN/DD |
| 3 | 2018 | 22 | 11,984,928,481 | APBN/DD |
| 4 | 2019 | 30 | 2.239.528.265 | APBN/DD |
| 5 | 2020 | | | APBN / DD |
| TOTAL | | | | |

b. Sub 2 Indikator 1 Kinerja Sasaran II : Jumlah Kelompok Ekonomi Masyarakat Desa yang dibentuk dan diina

- 1) **Pembinaan SPKP UPK PNPM** : Capaian kinerja keberdayaan masyarakat yang partisipatif juga dilakukan melalui pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengelola usaha Ekonomi produktif dan bantuan permodalan usaha.

Kelompok ekonomi masyarakat yang saat ini dibina adalah kelompok ekonomi yang telah dibentuk sejak program PNPM diberlakukan. Operasionalisasi kelompok ini dibawah tanggung jawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan. Sejak awal hingga saat ini terdapat 12 UPK di 12 Kecamatan yang mengelola pembiayaan usaha ekonomi produktif dan bantuan permodalan usaha kelompok masyarakat.

Perkembangan kinerja UPK dalam mengelola dana PNPM tersebut tergambar dalam tabel sebagai berikut:

DATA PERKEMBANGAN MODAL USAHA SPKP UPK PNPM TAHUN 2019 dan 2020

| No | Nama Kecamatan | Jlh Desa / Kel | TAHUN 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | Keterangan |
|--------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--|----------------------|
| | | | Total Dana Perguliran | Perkiraan Nilai Aset Lain | Total Dana Perguliran | Perkiraan Nilai Aset Lain | | |
| | | | Rp | Rp | Rp | Rp | | |
| 1 | Cibal | 17 | 7.076.000.296 | 35.324.350 | 7.467.234.158 | 35.324.350 | Dilaporkan setelah pelaksanaan MAD Bulan Februari 2021 | Aset-aset lain: |
| 2 | Rahong Utara | 12 | 4.596.519.245 | | 4.695.256.579 | | | antara lain: |
| 3 | Langke Rembog | 20 | 2.167.433.528 | 30.022.222 | 2.316.519.078 | 3.677.778 | | - Tanah |
| 4 | Ruteng | 19 | 10.419.492.108 | 96.930.985 | 11.197.844.727 | - | | - Gedung |
| 5 | Wae Rii | 16 | 3.697.274.072 | 726.074.979 | 3.540.108.351 | - | | -Inventaris |
| 6 | Reok | 10 | 4.375.315.166 | 18.923.000 | 3.510.606.370 | 18.562.634 | | (Motor, Laptop, dll) |
| 7 | Reok Barat | 10 | 334.885.000 | - | 334.885.000 | - | | |
| 8 | Satar Mese | 21 | 2.657.291.601 | 62.573.000 | 2.657.291.601 | 62.573.000 | | |
| 9 | Satar Mese Barat | 20 | 5.734.917.186 | 40.609.000 | 6.120.349.601 | 5.808.333 | | |
| 10 | Lelak | 10 | 5.187.306.679 | 79.303.000 | 5.205.015.344 | 10.200.000 | | |
| 11 | Cibal Barat | 10 | 357.450.035 | 23.359.088 | 1.610.769.515 | 12.059.733 | | |
| Total | | | 46.603.884.916 | 447.021,355 | 48.655.880.584 | 148.205.828 | | |

- 2) **Pembinaan Pokjantal Posyandu.** Pembinaan untuk menunjang perekonomian desa juga dilakukan melalui penggerakan kelompok dan kader pokjantal posyandu di tingkat desa yang berjumlah 20 kelompok di tahun 2020. Pembinaan terhadap Pokjantal Posyandu dipandang perlu terus menerus dilakukan karena disamping banyak perubahan kader dalam kelompok juga untuk memotivasi kader berperan aktif sebagai penggerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang kesehatan.

DATA PEMBINAAN POKJANTAL POSYANDU TAHUN 2020

| NO | KEC | DESA | | ASPEK PEMBINAAN |
|----|------------------|------|--------------|--|
| 1 | Ruteng | 1 | Compang Dalo | 1 Regulasi Desa (SK Pokjantal) |
| | | 2 | Cumbi | 2 Fasilitasi Pembentukan Pokjantal Desa dan |
| 2 | Satar Mese Utara | 3 | Popo | unit pengelola posyandu desa |
| | | 4 | Mata wae | 3 Penguatan kelembagaan Pokjantal Posyandu |
| 3 | Satar Mese Barat | 5 | Wongka | 4 Penyusunan Rencana kegiatan pokjantal posyandu |
| | | 6 | Cambir Leca | 5 Pembinaan administrasi pokjantal dan |
| 4 | Cibal Barat | 7 | Latung | unit pengelola posyandu desa |
| | | 8 | Golo Woi | |
| 5 | Satar Mese | 9 | Satar Loung | |
| | | 10 | Jaong | |
| | | 11 | Golo Lambo | |
| | | 12 | Langgo | |
| | | 13 | Tado | |
| | | 14 | Lungar | |
| | | 15 | Mocok | |
| | | 16 | Golo Muntas | |

| | | | | |
|---|------------|----|------------|--|
| | | 17 | Ulu Belang | |
| | | 18 | Gara | |
| 6 | Reok Barat | 19 | Robek | |
| | | 20 | Ruis | |

c. Sub 3 Indikator Kinerja II: Jumlah Desa dan Lembaga Masyarakat Desa yang dibentuk dan dibina

1. **Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Dana Desa.** Capaian kinerja keberdayaan masyarakat yang partisipatif juga tergambar melalui transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Pembinaan dilakukan mencakup aspek perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan Inspektorat Kabupaten.

Pembinaan pengelolaan keuangan desa pada aspek perencanaan meliputi :

- 1). Ketepatan waktu pelaksanaan musyawarah dusun dan desa;
- 2). Penyusunan RKPDes;
- 3). Penyusunan RAPBDes;
- 4). Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan;
- 5). Bimbingan teknis pengoperasian Aplikasi Siskeudes;
- 6). Regulasi anggaran desa.

Capaian kinerja pembinaan pada aspek perencanaan desa telah dilakukan terhadap 145 desa. Seluruh 145 desa telah melaksanakan perencanaan dan melaporkan ketersediaan dokumen perencanaan.

walaupun dari segi ketepatan waktu masih banyak desa yang terlambat dalam waktu pelaksanaan.

Capaian kinerja pembinaan pada aspek pertanggungjawaban keuangan desa telah dilakukan terhadap 145 desa.

Pembinaan mencakup 2 hal yaitu ketepatan waktu pertanggungjawaban dan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban. Dalam aspek ini tidak semua desa melakukan pertanggungjawaban tepat waktu dan masih ditemukan ketidaklengkapan dokumen SPJ kegiatan desa.

Berdasarkan evaluasi terhadap ketepatan waktu penyaluran dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dapat disimpulkan semua desa terlambat memperoleh penyaluran dan melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa karena belum memenuhi syarat penyaluran antara lain: 1). Perdes APBDes; 2). Laporan Realisasi belanja; dan 3). Kelengkapan SPJ keuangan atau dapat kami gambarkan melalui tabel dibawah ini :

Tabel Pengelolaan ADD Tahun 2020 :

| No | Uraian | Jumlah Desa |
|--------------|---|-------------|
| 1. | Penyampaian Laporan Realisasi Tidak Tepat Waktu | 82 |
| 2. | Penyampaian SPJ Tidak Lengkap | - |
| 3. | Perbaikan SPJ | 20 |
| 4. | SPJ/Laporan Realisasi yang Lengkap | - |
| Total | | 102 |

2. **Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).** Untuk kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2020 tidak terlaksana. Dikarenakan dana tersebut dirasionalisasi.

Tabel Lokasi Pencanangan BBGRM :

| No | Lokasi Desa/Kecamatan | Jumlah Desa | Tahun |
|----|---------------------------|-------------|-------|
| 1. | Kajong/Reok Barat | 1 | 2016 |
| 2. | Bangka Ajang/Rahong Utara | 1 | 2017 |
| 3. | Golo Lanak/Cibal Barat | 1 | 2018 |
| 4. | Watu Tango / Reok | 1 | 2019 |
| 5. | - | - | 2020 |

3. **Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga.** Capaian kinerja keberdayaan masyarakat yang partisipatif juga melalui upaya pelibatan keluarga dalam pembangunan yang dimotori oleh TP-PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa sebanyak 184 kelompok. Tahun 2020 jumlah PKK aktif adalah sebagai berikut :

- 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten
- 12 Tim penggerak PKK Kecamatan
- 26 Tim penggerak PKK Kelurahan
- 145 Tim penggerak PKK Desa

Upaya pemberdayaan keluarga dimulai dari upaya Penguatan Kelembagaan PKK melalui rapat evaluasi dan rapat konsultasi. Sedangkan upaya langsung pemberdayaan keluarga dilakukan melalui pelaksanaan Jambore Kader PKK, Sosialisasi, Pelatihan Bina Keluarga Balita, Pelatihan UP2K, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Sandang, Pengelolaan Pangan local, Gerakan Halaman Asri, Pemanfaatan Bahan Tenun, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Kader Pembantu Bumil, Pelatihan Kader PHBS, Sosialisasi Pencegahan Penyakit. Pembinaan yang dilakukan DPMD terhadap pemberdayaan keluarga hanya pada aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, sedangkan seluruh operasional kegiatan dilimpahkan ke TP-PKK Kabupaten.

4. **Penataan Desa.** Capaian kinerja keberdayaan masyarakat yang partisipatif terlihat dari peran aktif masyarakat dalam aktifitas penataan desa. Tahun 2020, kegiatan penataan desa difokuskan pada upaya masyarakat dalam mengusulkan pemekaran desa.

1. **Tahun 2019** Dinas PMD Kabupaten Manggarai melakukan sosialisasi kepada 145 BPD dan Kepala Desa di 11 kecamatan. Hasil sosialisasi telah direspon oleh 26 Desa dengan mengajukan proposal pemekaran

dan ditindaklanjuti oleh DPMD dengan melakukan Verifikasi terhadap proposal yang disampaikan dengan mengecek dokumen proposal dengan kondisi riil di lapangan untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten.

**DATA NAMA DESA YANG MENGAJUKAN PROPOSAL PEMEKARAN
DESA
TAHUN 2020**

| NO | KECAMATAN | NAMA DESA | | KETERANGAN |
|----|------------------|--------------|------------------------------|--|
| | | INDUK | CALON DESA PERSIAPAN | |
| 1 | Satar Mese | 1 | Wewo | Bangka Gonggor |
| | | 2 | Koak | Ulu Koak |
| | | 3 | Wae Ajang | Kaca |
| | | 4 | Paka | Satar Loleng |
| | | 5 | Tal | Nanga Woja |
| | | 6 | Langgo | Watu Lajar |
| | | 7 | Legu | Bangka Redeng |
| | | 8 | Moco, Lungar, Golo Muntas | Pong Meleng |
| 2 | Satar Mese Utara | 9 | Nao | Compang wotol |
| | | 10 | Kole | Ndajang |
| | | 11 | Lia | Compang Repok |
| 3 | Ruteng | 12 | Meler | Pong Ndung |
| | | 13 | Beo Rahong | Golo Cumang |
| | | 14 | Benteng Kuwu | Benteng Wake |
| 4 | Cibal | 15 | Riung | Bangka Gumbang |
| | | 16 | Golo | Golo Roco |
| 5 | Rahong Utara | 17 | Liang Bua | Mbau Langke |
| 6 | Lelak | 18 | Ketang | Ra'ong |
| | | 19 | Lentang | Watu Weru |
| 7 | Wae Rii | 20 | Wae Mulu | Bangka Nderu |
| | | 21 | Bangka Kenda | Compang Kaweng |
| | | 22 | Golo Watu | Compang Ru'a |
| | | 23 | Sambi | Pasat |
| 8 | Reok Barat | 24 | Kajong | (usulan mekar 3 Desa) |
| | | 25 | Satar Lenda | Denge |
| 9 | Satar Mese Barat | 26 | Satar Ruwuk | Pasir Putih |
| | | 27 | Hilihintir | Hilihintir Selatan dan Muku Te'e (Usulan mekar 2 Desa) |
| | | 28 | Wae Renca | Bea Denger |
| 10 | Cibal Barat | 29 | Lenda | Madona |
| | | TOTAL | | 29 Desa |

DATA NAMA DESA PERSIAPAN YANG SUDAH DIRESMIKAN TAHUN 2020

| NO | KECAMATAN | NAMA DESA | | NAMA IBU KOTA DESA PERSIAPAN | |
|--------------|-----------------|-----------|--------------|------------------------------|----------------|
| | | INDUK | PERSIAPAN | | |
| 1 | Satar Mese | 1 | Pongkor | Ulungali | Ulungali |
| 2 | Ruteng | 2 | Bulan | Bung | Lando |
| | | 3 | Golo Worok | Bangka Wela | Wela |
| 3 | Cibal | 4 | Ladur | Liang Tongkeng | Wancang |
| | | 5 | Welu | Lura | Lujang |
| | | 6 | Nenu | Benteng Todo | Haor |
| 4 | Rahong Utara | 7 | Golo Langkok | Golo Wangko | Wangko |
| | | 8 | Buar | Compang Ntala | Ntala |
| | | 9 | Pong Lengor | Bangka Putuk | Galang |
| | | 10 | Tengku Lese | Cunca Lega | Rongges Rowe |
| 5 | Lelak | 11 | Bangka Lelak | Wae Nanga | Mbohang |
| | | 12 | Urang | Redo | Redo |
| 6 | Wae Rii | 13 | Golo Cador | Golo Ling | Ling |
| | | 14 | Wae Rii | Bangka Wade | Lingko Nunang |
| 7 | Reok Barat | 15 | Ruis | Ruis Timur | Wae Belang |
| | | 16 | Loce | Benteng Loce | Tagol |
| 8 | Satarmese Barat | 17 | Satar Luju | Luju Mas | Watu Dali |
| | | 18 | Terong | Bea Terong | Lokom |
| | | 19 | Cambir Leca | Lereng | Reda |
| 9 | Cibal Barat | 20 | Bere | Compang Bere | Roho |
| | | 21 | Wae Codi | Golo Taas | Cekok |
| | | 22 | Timbu | Lada | Timbu |
| TOTAL | | | | | 22 Desa |

5. ***Penguatan Kapasitas Lembaga Adat.*** Capaian kinerja keberdayaan masyarakat yang partisipatif dilakukan dengan mendorong peran lembaga adat yang ada di setiap desa. Peran lembaga adat dengan kearifan lokal mereka masih relevan menjawab persoalan praktis kehidupan masyarakat desa. Guna mengoptimalkan peran lembaga adat desa, DPMD telah memfasilitasi pembentukan 11 lembaga adat di desa sebagai berikut:

DATA SOSIALISASI PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DESA TAHUN 2020

| NO | KECAMATAN | DESA/KEL |
|----|------------------|----------------|
| 1 | Ruteng | Pong Lale |
| | | Benteng Kuwu |
| 2 | Wae Rii | Compang Ndehes |
| | | Poco |
| | | Bangka Jong |
| | | Golo Cador |
| 3 | Cibal | Gapong |
| | | Kentol |
| 4 | Satar Mese Utara | Popo |
| | | Mata Wae |
| 5 | Reok | Bajak |

6. **Lomba Strata Posyandu.** Partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan juga terlihat dari peran lembaga di desa dalam bidang kesehatan yang dimotori oleh Posyandu Desa. Kualitas partisipasi lembaga desa tersebut diukur dari kemampuan mereka dalam menggerakkan masyarakat menjalankan pola hidup bersih dan sehat, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan berkala, serta kerjasama antar jejaring kesehatan. Kesuksesan lembaga tersebut bervariasi diberbagai desa. Guna mengapresiasi prestasi yang telah dikerjakan pada 145 desa maka dibuatlah lomba antar berbagai posyandu tersebut dengan cara mengevaluasi kinerja setiap posyandu dan menjaring desa pengelola posyandu terbaik untuk ditetapkan sebagai juara menurut masing-masing strata posyandu. Tahun 2020, desa juara berdasarkan strata posyandu adalah sebagai berikut:

DATA DESA JUARA LOMBA STRATA POSYANDU TAHUN 2020

| NO | TINGKATAN STRATA | POSYANDU JUARA | DESA/KEL | KECAMATAN |
|----|------------------|----------------|----------|------------------|
| 1 | Madya | Jaong | Nao | Satar Mese Utara |
| 2 | Purnama | Wewo | Wewo | Satar Mese |
| 3 | Mandiri | Ponggeok | Ponggeok | Satar Mese |

A. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN SASARAN

1. **Keberhasilan:** Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Dinas PMD antara lain:
 - a. Ketersediaan anggaran untuk membiayai kegiatan;
 - b. Kesiapan aparatur pelaksana tugas; dan
 - c. Kesadaran dari semua pihak pelaksana program dan kegiatan.
2. **Hambatan:** berkaitan dengan tidak dilaksanakannya 4 (empat) kegiatan yang telah direncanakan diawal tahun yaitu :
 - 1) Pengadaan Mebeluer

- 2) Pengadaan genzet
- 3) Rapat evaluasi/rapat kerja dengan perangkat desa; dan
- 4) Bulan Bakti Gotong Royong
- 5) Pilkades

Kegiatan ini batal dilaksanakan karena terjadi rasionalisasi anggaran Pemerintah Daerah. Hambatan lain yang dihadapi Dinas PMD dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal.

Faktor Eksternal:

Kinerja Pemerintah Desa belum optimal dari aspek kerjasama, pengembangan pengetahuan, ketaatan pada aturan, serta tertib administrasi menyebabkan keterlambatan dalam perencanaan, laporan pertanggungjawaban, serta temuan penyimpangan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Faktor Internal:

- a. Persiapan pelaksanaan kegiatan belum optimal;
 - b. Jadwal pelaksanaan kegiatan direncanakan kurang terintegrasi sehingga terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan dipertengahan dan akhir tahun.
 - c. Terdapat 2 (dua) jabatan yang lowong pada Dinas PMD karena pensiun dan meninggal dunia, belum ada pengganti.
- 1) **Upaya mengatasi hambatan.** Hambatan dalam pelaksanaan tugas Dinas PMD yang dipengaruhi faktor eksternal diatasi dengan cara:
- a. Melakukan Bimtek bagi Aparatur dalam Bidang Manajemen Pemerintahan.
 - b. Melakukan Pelatihan-Pelatihan khusus bagi pelaksana program dan kegiatan.
 - c. Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.
 - d. Mengintegrasikan penyusunan rencana pembinaan desa.
 - e. Menugaskan staf yang memenuhi syarat oleh kepala dinas untuk melaksanakan tugas pejabat struktur yang lowong.

B. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Kondisi 31 Desember 2020, jumlah Pegawai pada Dinas PMD sebanyak 24 orang PNS dan 1 orang Tenaga Kontrak Daerah. Sehingga diperlukan tambahan tenaga staf sebanyak 6 orang lagi untuk menggantikan pegawai yang pensiun.

Anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan untuk membiayai sejumlah sasaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kab. Manggarai adalah :

Rp.1.292.425.700.- dengan anggaran per Sasaran Kinerja adalah sebagai berikut :

| | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. Sasaran I..... | = Rp. 418.353.500.- |
| 2. Sasaran II..... | = <u>Rp. 759.575.140.-</u> |
| Total..... | = Rp. 1.292.425.700.- |

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai mendapat alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 1.586.199.471,- dengan rincian sbb :

Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan DPMD pada Tahun Anggaran 2020 tertuang dalam tabel dibawah ini :

Realisasi Belanja Langsung

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN (RP.) | REALISASI (RP.) | % | |
|---------------------|--|-------------------------|--|--|------------------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Meningkat nya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa | 1 | Jumlah desa yang difasilitasi dan dibina: | Program peningkatan kapasitas Aparatur Desa | | | |
| | | 1 | Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan Ketua BPD | 1 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Ketua BPD | 10.378.000 | 8.278.000 | 79.76 |
| | | 2 | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan RPJMDes dan RKP Desa | 2 Fasilitas Penyusunan RPJMDes dan RKPDes | 24.649.000 | 24.499.000 | 99.39 |
| | | 3 | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan APBDes dan RRK Desa | 3 Fasilitas Penyusunan APBDes dan RRKDesa | 65.169.000 | 65.019.000 | 99.77 |
| | | 2 | Jumlah Ranperda yang diusulkan | 4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) | - | - | - |
| | | 3 | Jumlah desa yang pengelolaan administrasinya baik | 5 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa | 236.802.000 | 222.303.800 | 93.88 |
| | | 4 | Jumlah Pelantikan Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa dan BPD | 6 Pelantikan Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa dan BPD | 750.000 | 750.000 | 100 |
| | | 5 | Jumlah Satker Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa | 7 Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa | 90.695.700 | 90.545.700 | 99.83 |
| TOTAL I | | | | 427.693.700 | 410.645.500 | 96.01 | |
| 2 | Meningkat nya Keberdayaan Masyarakat yang partisipatif | 1 | Jumlah Lembaga ekonomi pedesaan yang dibentuk dan dibina | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa | | | |
| | | 1 | Jumlah Bumdes yang dibentuk dan dibina | 1 Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) | 91.085.700 | 90.485.700 | 99.34 |
| | | 2 | Jumlah Kelompok masyarakat yang dibina: | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | | | |
| | | 1 | Jumlah Pokjanal Posyandu yang dibina | 1 Operasional sekretariat Pokjanal Posyandu Kabupaten | 58.138.000 | 58.138.000 | 100 |
| | | 2 | Jumlah UPK kelompok SPKP yang dibina dan jumlah aset kelompok yang ditata | 2 Penataan dan validasi kelompok SPKP dan Aset PNPM NFD dan MP3KI | 60.454.000 | 60.454.000 | 100 |
| | | 3 | Jumlah desa dan lembaga masyarakat desa yang difasilitasi dan dibina: | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa | | | |
| | | 1 | Jumlah desa yang mendapat pembinaan pengelolaan dana desa | 1 Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP) PNPM Oo | 156.916.500 | 156.536.040 | 99.76 |
| | | 2 | Desa yang ditetapkan untuk peringatan BBGRM | 2 Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) | - | - | - |
| | | 3 | Jumlah kelompok PKK yang dibina dan difasilitasi | 3 Fasilitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | 155.839.000 | 94.072.800 | 60.37 |
| | | 4 | Jumlah Desa yang dimekarkan | 4 Penataan Desa (Pemekaran Desa) | 271.678.000 | 219.927.600 | 80.95 |
| | | 6 | Jumlah lembaga adat yang difasilitasi dan dibina | 6 Penguatan Kapasitas Lembaga Adat Desa | 47.741.000 | 47.741.000 | 100 |
| 7 | Jumlah posyandu juara lomba starata | 7 Lomba Strata Posyandu | 32.220.000 | 32.220.000 | 100 | | |
| TOTAL II | | | | 874.072.200 | 759.575.140 | 86.90 | |
| TOTAL I + II | | | | 1.301.765.900.- | 1.170.220.640.- | 91.45 | |

BAB IV PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai merupakan Instansi Pemerintah yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan amanah untuk melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menunjukkan komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misi DPMD Kab. Manggarai sekaligus Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Manggarai. Secara ringkas seluruh capaian kinerja 2 (dua) sasaran dan 4 indikator kinerja telah memerikan gambaran yang sangat berarti untuk terus meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dalam menjalankan roda pembangunan di Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja dari 4 Program dan 26 Kegiatan tersebut yaitu Realisasi Keuangan **97.08 %** dan Realisasi Fisik **97.08 %**. Kondisi ini menunjukkan bahwa DPMD telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Disamping keberhasilan yang telah diperoleh, masih sangat dibutuhkan perbaikan-perbaikan dan pembenahan khususnya pada realisasi keuangan dan fisik yang belum mencapai 100% serta keterlambatan dalam pertanggungjawaban.

Dalam keterbatasan sumber daya aparatur, pembiayaan dan peralatan serta perlengkapan kerja yang ada pada DPMD Kabupaten Manggarai, maka segala keberhasilan yang dicapai merupakan hasil penyelenggaraan dan pelaksanaan atas 4 Program dan 26 Kegiatan dalam 2 Sasaran dan 4 Indikator Kinerja Sasaran diharapkan tidak mengurangi makna pertanggungjawaban yang meliputi aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021 ini disampaikan untuk maklum dan urusan selanjutnya.

Terima Kasih.

Ruteng, 30 Januari 2022

KEPALA DINAS PMD KABUPATEN MANGGARAI,


DRS. YOSEPH TEHALUT
PEMBINA TK.I
NIP. 196510281994021002